

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian**

Kewenangan yang diberikan kepada daerah merupakan bentuk untuk mewujudkan daerah yang mandiri dan mampu mengurus serta mengatur kebutuhan daerahnya. Di era reformasi seperti saat ini, pemberian kewenangan otonomi lebih diarahkan pada tingkatan yang terendah dalam struktur pemerintahan yaitu Desa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pembangunan di desa yang pada era otonomi desa dapat mendukung pondasi desa itu sendiri. Otonomi desa bukan hanya menciptakan birokrasi di lembaga desa baik, tetapi bagaimana lembaga desa dan masyarakat mampu berjalan bersama-sama menciptakan desa yang mandiri dan masyarakat yang mandiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha desa.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDES juga bisa mendirikan usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. BUMDes merupakan bentuk pendayagunaan desa yang dibangun oleh aparatur desa dimana penyertaan modal serta penyelenggaraannya dilaksanakan oleh aparatur desa serta penduduk desa.

Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa yaitu untuk mewujudkan otonomi desa serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Apabila dilihat dari tujuan pendirian BUMDes tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga BUMDes dikatakan berhasil apabila dapat mencapai target maupun sasaran yaitu memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli desa. Guna mencapai target maupun sasaran tersebut maka diperlukan adanya kolaborasi yang bersinergi antara aparatur desa dengan warga desa. Adanya ketegasan dan juga keterampilan pemerintah dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diharapkan mampu menciptakan pengelolaan BUMDes yang baik sehingga tujuan serta target dari pendirian BUMDes dapat terealisasi.

Di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Bali menargetkan untuk seluruh desa yang ada di Bali sudah mempunyai BUMDes yaitu pada tahun 2023. Data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali, jumlah BUMDes yang ada di Bali yaitu sebanyak 609 BUMDes yang tersebar di 9 Kabupaten di Provinsi Bali. Adapun rincian data jumlah BUMDes yang ada di Provinsi Bali.

**Tabel 1.1****Data Jumlah BUMDes Tiap Kabupaten di Provinsi Bali**

<b>No.</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Jumlah BUMDES</b>
1.	Jembrana	41
2.	Tabanan	120
3.	Badung	46
4.	Gianyar	62
5.	Klungkung	48
6.	Bangli	68
7.	Karangasem	71
8.	Buleleng	126
9.	Denpasar	27
<b>Total</b>		<b>609</b>

( Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dilihat bahwa Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten yang memiliki jumlah BUMDes terbanyak dibandingkan dengan jumlah BUMDes yang ada di Kabupaten lain yaitu berjumlah 126 unit BUMDes. Pembentukan BUMDes ini adalah salah satu upaya untuk mempercepat penanganan kemiskinan di daerah Kabupaten Buleleng. Namun dari jumlah BUMDes yang pesat di Kabupaten Buleleng sampai saat ini kasus kecurangan dalam pengelolaan dana BUMDes masih banyak ditemukan dan telah menarik banyak perhatian media dan menjadi isu yang menonjol serta penting di mata masyarakat. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Nyatanya dalam pengelolaan BUMDes banyak sekali ditemukan kasus kecurangan seperti dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan uang yang banyak dilakukan oleh pengurus BUMDes dimana dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan BUMDes

malah digunakan untuk kegiatan-kegiatan diluar kegiatan BUMDes. Adapun beberapa kasus-kasus peyelewengan dana BUMDes di Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

Tabel 1.2 dibawah ini merupakan beberapa kasus penyelewengan dana BUMDes di Kabupaten Buleleng.

**Tabel 1.2**  
**Kasus-Kasus Penyelewengan Dana BUMDes di Kabupaten Buleleng**

No.	Tahun	Kasus	Jumlah Kerugian
1.	2021	Adanya penyalahgunaan dana BUMDes dengan melakukan pinjaman kredit dengan menggunakan nama orang lain dan digunakan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan Ketua BUMDes Sadu Amertha, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Buleleng (Detiknews.com)	± Rp 88 juta
2.	2020	Adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh pengurus BUMDes yang tidak menyetorkan dana tabungan nasabah melainkan digunakan oleh oknum pengurus BUMDes Mekar Laba, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Buleleng (RadarBali.id)	Rp 283 juta
3.	2019	Adanya kasus tindak pidana korupsi penyelewengan dana BUMDes dengan membuat kredit fiktif yang dilakukan oleh Ketua BUMDes Amarnya, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Buleleng (NusaBali.com)	Rp 512 juta
4.	2018	Adanya penyelewengan dana dan pembuatan laporan fiktif yang dilakukan oleh pengurus BUMDes Puncak Sari, Busungbiu, Buleleng (NusaBali.com)	Rp 436 juta

(Sumber : Data diolah, 2022)

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan untuk mengetahui kebenaran dari kasus kecurangan yang terjadi diatas, peneliti mencoba mencari informasi

dengan melakukan wawancara dengan salah satu pengurus BUMDes di salah satu Desa di Kecamatan Banjar yang BUMDes mengalami kasus kecurangan dalam pengelolaan dana BUMDes. Beliau mengatakan memang benar di BUMDes tempatnya bekerja mengalami kasus kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pengurus yang bekerja di dalam BUMDes tersebut. Kecurangan yang dilakukan adalah dengan menggunakan dana BUMDes untuk kepentingan pribadi dengan melakukan pinjaman kredit dengan menggunakan nama orang lain. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa kecurangan terjadi diakibatkan karena Sistem pengendalian internal yang dimiliki BUMDes tidak efektif sehingga tata Kelola dalam BUMDes tersebut tidak dalam diimplementasikan dengan maksimal. Serta masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki pada BUMDes tersebut dimana sebagian dari pengurus BUMDes tersebut merupakan lulusan SMA dan masih kurang memahami cara mengoperasikan computer dengan baik sehingga pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban masih mengalami keterlambatan pelaporan dan dibuat dengan sangat sederhana serta masih kurangnya motivasi pengurus untuk memperbaiki mutu kerja. Berdasarkan permasalahan diatas, maka diperlukan faktor-faktor yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya suatu kecurangan. Pencegahan yang dilakukan terhadap suatu kecurangan dianggap sebagai suatu jalan keluar untuk bisa mempersempit ruang gerak serta mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko terhadap terjadinya kecurangan (Karyono,2013).

Faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana BUMDes adalah Sistem pengendalian internal yang memiliki pengaruh

terhadap *Good Corporate Governance* sehingga berimplikasi terhadap pencegahan *fraud*. Sistem pengendalian internal merupakan salah satu sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Dalam mewujudkan sistem pengendalian internal yang baik dan tepat dalam suatu organisasi, dibutuhkan suatu evaluasi. Dimana hal tersebut diharapkan mampu mencegah penyelewengan yang dapat terjadi di dalam suatu organisasi. Sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen jaminan yang wajar bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering disebut pengendalian, dan secara kolektif mereka meringkas pengendalian internal organisasi itu.

Dimana dalam penelitian ini menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia karena dari fenomena kasus penyelewengan dana BUMDes di Kabupaten Buleleng dilakukan oleh pengurus BUMDes itu sendiri sehingga perlu diterapkannya sistem pengendalian internal terutama pengawasan dalam pengelolaan dana BUMDes. dengan cara melakukan pemeriksaan dan pemantauan seperti mewajibkan setiap pengurus BUMDes untuk membuat laporan jurnal pencapaian kinerja setiap minggu/bulan sehingga ketua dapat mengetahui atau mengontrol seluruh kinerja pengurus dan mengetahui sejak dini kalau ada kecurangan yang dilakukan. Penerapan sistem pengendalian internal yang kurang baik akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan kualitas laporan keuangan dalam suatu organisasi, sehingga sistem pengendalian internal menjadi sangat

penting dalam suatu organisasi seperti BUMDes untuk dapat meningkatkan kinerjanya dan juga mencegah terjadinya kecurangan dalam organisasi tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Wonar (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Izzaty (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*, pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rustandy (2020) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Dimana apabila dalam suatu BUMDes dapat menerapkan sistem pengendalian internal secara baik dan tepat maka hal tersebut dapat meningkatkan kinerja dan pengelolaan keuangan BUMDes dan juga mencegah terjadinya kecurangan dalam BUMDes tersebut.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana BUMDes yaitu budaya organisasi, dalam sebuah organisasi terdapat suatu budaya yang berbeda antara satu dengan yang lain. Budaya merupakan salah satu bagian yang menjadi perhatian bagi perusahaan ataupun organisasi dalam upaya pencegahan *fraud*. Salah satu alasan yang mendasari atau mendorong seseorang berbuat *fraud* di dalam suatu perusahaan atau organisasi adalah karena adanya kesempatan (*opportunity*). Kesempatan untuk berbuat *fraud* disebabkan karena kondisi lingkungan sekitar yang mendukung. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana konsep dari budaya yang ada di dalam organisasi tersebut.

Dimana dalam penelitian ini menggunakan variabel budaya organisasi dikarenakan pada salah satu BUMDes yang saya wawancarai budaya organisasi sudah diterapkan namun kurang maksimal karena masih terdapat pengurus BUMDes yang belum memiliki inisiatif yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan dan kurang berkomitmen terhadap tujuan utama BUMDes sehingga kinerja organisasi belum berjalan dengan baik sehingga akan memunculkan peluang melakukan tindakan fraud. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut diharapkan pengurus BUMDes dapat meningkatkan penerapan budaya organisasi pada BUMDes dengan menanamkan kebiasaan atau perilaku untuk dapat berkomitmen terhadap organisasi dan selalu menanamkan budaya kejujuran dan menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Menurut Hikmah, Oktaroza, dan Purnamasari (2018) budaya organisasi menggambarkan bagaimana ideologi dari organisasi maupun perusahaan tersebut. Budaya yang kuat mengindikasikan bahwa nilai-nilai yang menjadi inti dari perusahaan dalam hal kehidupan sehari-hari di tempat kerja telah dipatuhi dan diterapkan oleh para karyawan yang ada di dalamnya. Budaya organisasi yang kuat akan menciptakan suatu kondisi yang baik meliputi kebiasaan, bahasa, gaya, dan komunikasi. Selain itu, budaya organisasi yang baik akan membangun tata kelola yang baik dan sehat pula.

Pemahaman terhadap budaya menjadi sesuatu yang harus diperhatikan bersama oleh seluruh anggota dari BUMDes. Budaya yang sehat dan kuat akan membuat pegawai yang ada di dalam BUMDes untuk bekerja secara tanggung jawab dan berkomitmen untuk menjalankan badan usaha milik desa secara baik

dan terbebas dari upaya tindakan penyelewengan. Dalam mencegah kecurangan untuk meningkatkan kinerja pengurus BUMDes, melindungi kepentingan BUMDes dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum bagi pengurus BUMDes di Indonesia wajib melaksanakan peningkatan budaya organisasi. Dimana pengurus BUMDes memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat desa, sehingga dalam suatu BUMDes budaya organisasi sangat penting. Budaya dalam pembahasan ini lebih mengarah terhadap budaya yang dapat mencegah kecurangan. Menurut Zelmianti dan Anita (2015), budaya kejujuran dan etika yang bernilai tinggi dapat mencegah kecurangan dalam suatu organisasi. Selain itu, membangun budaya organisasi yang transparan mempengaruhi setiap masing-masing individu untuk menyesuaikan diri dengan budaya organisasi, sehingga tercipta nilai-nilai ataupun norma positif yang akan menghindarkan individu melakukan tindak kecurangan. Menurut (Tunggal,2011) budaya kejujuran dan etika yang bernilai tinggi dapat mencegah kecurangan dalam suatu organisasi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siregar & Hamdani (2018) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Priscillia (2019) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anandya (2020) yang menyatakan bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Dimana budaya

organisasi yang baik sangat penting dalam mencegah tindakan kecurangan. Tindakan pencegahan dapat diterapkan melalui budaya kerja yang dikembangkan dengan baik akan menghasilkan nilai-nilai fundamental organisasi yang baik seperti menjunjung tinggi kejujuran dan integritas penghargaan dan kualitas kerja serta pelayanan yang prima dan penghormatan atas keterbukaan dan transparansi.

Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana BUMDes yaitu kompetensi sumber daya manusia dimana dengan adanya profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan dana keuangan BUMDes, maka sangat diharapkan tujuan ekonomi dan sosial bagi masyarakat desa dapat tercapai.

Pada penelitian ini menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia karena masih banyaknya pengurus BUMDes yang belum memahami dan belum memiliki keahlian dalam pembuatan laporan keuangan yang dipengaruhi oleh tingkat Pendidikan dan pengalaman kerja dimana dalam observasi yang peneliti lakukan pada BUMDes Sebagian pengurus merupakan lulusan SMA sehingga sering terdapat kesulitan yang dirasakan pengurus BUMDes terutama dalam mengoperasikan computer sehingga pelaporan keuangan dan pertanggungjawabannya masih sangat sederhana, maka dari itu perlu adanya pembinaan dan juga pelatihan untuk dapat meningkatkan kompetensi pengurus BUMDes dalam pengelolaan dana BUMDes. yaitu dengan cara memberikan pelatihan atau diklat pengembangan kompetensi secara berkala sesuai dengan bidang kerja.

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Tingkat kompetensi sumber daya manusia perlu diperhatikan karena seseorang yang tidak memiliki kompetensi yang diperlukan dalam melakukan pekerjaannya maka akan berdampak pada kinerja yang tidak baik. Seorang yang tidak dapat mencapai kinerja yang baik akan menimbulkan masalah salah satunya yaitu dengan melakukan kecurangan. Sistem dan prosedur kerja yang sebaik apapun tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila individu yang melaksanakannya tidak memiliki kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu dipertimbangkan mengenai tingkat kompetensi berupa pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk mengerjakan pekerjaan tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Astini (2021) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti & Suardani (2019) menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksmi & Sujana (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*, dimana apabila kompetensi sumber daya manusia nya kurang baik maka akan menyebabkan pengelolaan keuangan tidak professional sehingga berpotensi terjadinya *fraud*, dan kompetensi sumber daya manusia dalam

pengelolaan keuangan harus bersinergi agar dapat melakukan pencegahan terjadinya *fraud*.

Dalam upaya pencegahan *fraud* diperlukan strategi pencegahan *fraud* yang efektif bagi BUMDes. Menurut Hermiyetti (2010) strategi pencegahan *fraud* merupakan suatu bagian dari program-program yang dirancang untuk mencegah atau mengendalikan tindakan *fraud*. Strategi ini berhubungan dengan bagaimana cara-cara untuk mengendalikan faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan *fraud* dengan menciptakan kondisi-kondisi yang dapat berhubungan langsung dengan tindakan pencegahan *fraud* di dalam BUMDes.

Pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menjadi indikator yang menunjukkan bahwa suatu organisasi telah dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Praktik *good corporate governance* menjadi sangat penting bagi suatu organisasi, di mana *good corporate governance* dapat dijadikan sebagai alat untuk mengendalikan manajemen dalam hal meningkatkan kinerja organisasi dan upaya membangun suatu organisasi yang sehat. Dimana BUMDes yang sehat umumnya terbebas dari hal-hal yang dapat merugikan dan merusak citra atau nilai BUMDes tersebut, salah satunya adalah tindakan *fraud*. Pengimplementasian *good corporate governance* menjadi suatu bentuk untuk mengurangi tindakan *fraud* tersebut. Hal tersebut didukung dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *good corporate governance* yang harus dilaksanakan oleh pengurus BUMDes, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran atau kesetaraan (Kristiana, Wahyuni, dan Sujana,

2017). *Good corporate governance* yang diharapkan dapat menjadi alat untuk mengurangi dan mencegah terjadinya tindakan *fraud* memerlukan kesinambungan fungsi dengan kompetensi sumber daya manusia, system pengendalian internal dan budaya organisasi untuk dapat berjalan secara maksimal.

Tata kelola yang baik yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dapat membantu mencegah upaya tindakan *fraud* yang dapat terjadi. Dimana teori agensi mampu menjelaskan cara untuk mengurangi masalah keagenan yang menimbulkan terjadinya *fraud* yaitu dengan mewujudkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi sehingga penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* akan semakin baik dan akan berdampak pada pencegahan *fraud*. Pengendalian intern harus dilaksanakan seefektif mungkin dalam suatu organisasi untuk mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan dan penyelewengan. Dimana sistem pengendalian internal memiliki pengaruh langsung terhadap *Good Governance* sehingga berimplikasi terhadap pencegahan *fraud*. Untuk mewujudkan pelaksanaan *good corporate governance* yang sesuai dengan pedoman yang berlaku, diperlukan budaya organisasi yang mendukung pelaksanaan *good corporate governance* di dalam suatu organisasi.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu factor internal dalam menerapkan *good corporate governance*. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap salah satu prinsip *good corporate governance* yaitu akuntabilitas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Safrijal (2016) menyatakan bahwa salah satu factor internal yang menyebabkan penerapan *good corporate*

*governance* belum berjalan dengan baik dan efektif karena kurangnya pemahaman sumber daya manusianya terhadap prinsip-prinsip *good corporate governance*, sehingga disarankan untuk meningkatkan pemahaman kompetensi sumber daya manusianya untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik sehingga dapat berimplikasi terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2020) dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa Budaya Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* melalui *good corporate governance*, penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2016), dan Prena & Kusmawan (2020) menunjukkan *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Kurniawan & Izzaty, (2019) menyatakan bahwa penerapan *good corporate governance* dapat mencegah terjadinya kecurangan, begitupun sebaliknya jika suatu organisasi tidak menerapkan *good corporate governance*, kemungkinan terjadinya kecurangan akan lebih besar karena manajemen dalam organisasi tidak berjalan secara profesional. Nadia et al., (2018) menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Dengan adanya faktor-faktor yang dapat mencegah terjadinya *fraud*, maka kecurangan dalam pengelolaan keuangan BUMDes dapat di minimalisir agar kasus-kasus penyelewengan dana BUMDes tidak terjadi kembali. Diharapkan juga masyarakat desa dapat ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan atau program-program yang dilaksanakan oleh BUMDes untuk dapat meningkatkan perekonomian desa dan pendapatan asli desa. Penelitian yang akan

dilakukan ini menggunakan sistem pengendalian internal, budaya organisasi dan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel independent, pencegahan *fraud* sebagai variabel dependen dan *good corporate governance* sebagai variabel intervening.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena masih banyaknya terjadi kasus penyelewengan dana BUMDes yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan negara. Dari berbagai kasus yang terjadi dilapangan serta hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten, memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ini karena cukup penting mengetahui pengaruh antara sistem pengendalian internal, budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan *good corporate governance* yang berkaitan dengan pencegahan *fraud*. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang mana dapat dilihat dari perbedaan variabel yang diteliti. Pada penelitian ini mengkombinasikan variabel sistem pengendalian internal, budaya organisasi dan kompetensi sumber daya manusia. Variabel sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia diteliti kembali karena adanya inkonsistensi hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, serta menambahkan *good corporate governance* sebagai variabel intervening dimana pada penelitian terdahulu hanya meneliti pengaruh langsungnya saja, sedangkan pada penelitian ini menambahkan model baru dimana *good corporate governance* sebagai variabel intervening. Serta dilakukan pada tahun penelitian yang berbeda dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 serta lokasi penelitian yang dilakukan pada BUMDes yang ada di Kabupaten

Buleleng karena masih jarangya penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pencegahan *fraud* pada BUMDes.

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan menggunakan sampel penelitian pada BUMDes di Kabupaten Buleleng karena Kabupaten Buleleng menjadi salah satu kabupaten yang memiliki jumlah BUMDes terbanyak yang ada di provinsi Bali dengan total 126 unit BUMDes yang tersebar di sembilan kecamatan yang ada di Buleleng serta di Kabupaten Buleleng baru-baru ini terdapat beberapa kasus penyelewengan dana BUMDes mengenai Adanya tindak pidana korupsi penyelewengan dana BUMDes dengan membuat kredit fiktif yang dilakukan oleh Ketua BUMDes Amarta, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, adanya penyelewengan dana dan pembuatan laporan fiktif yang dilakukan oleh pengurus BUMDes Puncak Sari, Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Adanya penyalahgunaan dana dengan melakukan pinjaman kredit dengan menggunakan nama orang lain dan digunakan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan Ketua BUMDes Sadu Amertha, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Buleleng sehingga peneliti ingin meneliti bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal, budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan *Fraud* dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Intervening”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Adanya berita mengenai kasus-kasus kecurangan pada pengelolaan dana BUMDes yang merugikan negara khususnya pada BUMDes yang ada di Kabupaten Buleleng dimana setiap tahunnya ada saja kasus kecurangan pada pengelolaan dana BUMDes yang dilakukan oleh pengurus BUMDes itu sendiri.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan mengatakan bahwa kecurangan yang terjadi pada BUMDes tempatnya bekerja dikarenakan masih kurangnya pelaksanaan sistem pengendalian internalnya yang dapat dilihat dari pelaku kecurangan yang merupakan pengurus BUMDes itu sendiri, sehingga tata Kelola BUMDes tidak diimplementasikan dengan baik yang mengakibatkan kasus penyelewengan dana pada BUMDes. Sehingga untuk meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian internal dan penerapan tata Kelola yang baik juga diperlukan budaya organisasi mengenai kejujuran dan etika dan kompetensi mengenai kemampuan serta pemahaman pengurus BUMDes mengenai pengimplementasian prinsip-prinsip tata Kelola organisasi yang baik untuk mencegah terjadinya *fraud*.
3. Hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan diatas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti membatasi aspek dalam penelitian ini yakni tentang pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, budaya organisasi dan penerapan *good corporate governance* yang berkaitan dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BUMDes khususnya pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh sistem pengendalian internal terhadap *good corporate governance* pada BUMDes di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah pengaruh budaya organisasi terhadap *good corporate governance* pada BUMDes di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimanakah pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap *good corporate governance* pada BUMDes di Kabupaten Buleleng?
4. Bagaimanakah pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada BUMDes di Kabupaten Buleleng ?
5. Bagaimanakah pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* pada BUMDes di Kabupaten Buleleng ?
6. Bagaimanakah pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* pada BUMDes di Kabupaten Buleleng ?

7. Bagaimanakah pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pada BUMDes di Kabupaten Buleleng ?
8. Bagaimanakah pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dengan *good corporate governance* sebagai variabel intervening pada BUMDes di Kabupaten Buleleng ?
9. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dengan *good corporate governance* sebagai variabel intervening pada BUMDes di Kabupaten Buleleng ?
10. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* dengan *good corporate governance* sebagai variabel intervening pada BUMDes di Kabupaten Buleleng ?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap *good corporate governance* pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap *good corporate governance* pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap *good corporate governance* pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.

5. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.
6. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.
7. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.
8. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dengan *good corporate governance* sebagai variabel intervening pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.
9. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dengan *good corporate governance* sebagai variabel intervening pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.
10. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* dengan *good corporate governance* sebagai variabel intervening pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.

### **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang hubungan antara sistem pengendalian internal, budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BUMDes.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Instansi yang bersangkutan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi instansi yang bersangkutan terkait pengelolaan dana BUMDes dan factor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BUMDes. Serta dapat memberikan Informasi yang diharapkan bermanfaat bagi pengurus BUMDes yaitu berkaitan dengan pentingnya sistem pengendalian internal, budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia dan *good corporate governance* terhadap upaya pencegahan *fraud*. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak pengurus BUMDes untuk membangun budaya organisasi yang baik, menerapkan sistem pengendalian internal yang baik dan terarah, meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia dan tata kelola yang baik sebagai bentuk pencegahan tindakan *fraud*.

### b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana BUMDes dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BUMDes.